

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Oleh :

NUZULUL SISWO ABDULAZIZ

NIM : G71217076



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuzulul Siswo Abdulaziz

NIM : G71217076

Fakultas / Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2015-2019

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Nuzulul Siswo Abdulaziz
NIM. G71217076

Skripsi yang ditulis oleh Nuzulul Siswo Abdulaziz NIM. G71217076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Betty Silfia Ayu Utami', written in a cursive style.

Betty Silfia Ayu Utami, S.E. M.S.E.

NIP: 198706102019032019

Skripsi yang ditulis oleh Nuzulul Siswo Abdulaziz NIM. G71217076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 02 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stratasatu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Betty Silfia Ayu Utami, S.E., M.S.E.
NIP. 198706102019032019

Penguji II,



Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.
NIP. 197008042005011003

Penguji III,



Hapsari Wiji Utami, M.S.E.
NIP. 198603082019032012

Penguji IV,



Abdullah Kafabih, M.S.E.
NIP. 199108072019031006

Surabaya, 02 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuzulul Siswo Abdulaziz
NIM : G71217076
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail address : nuzululsiswoaziz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 September 2021

Penulis

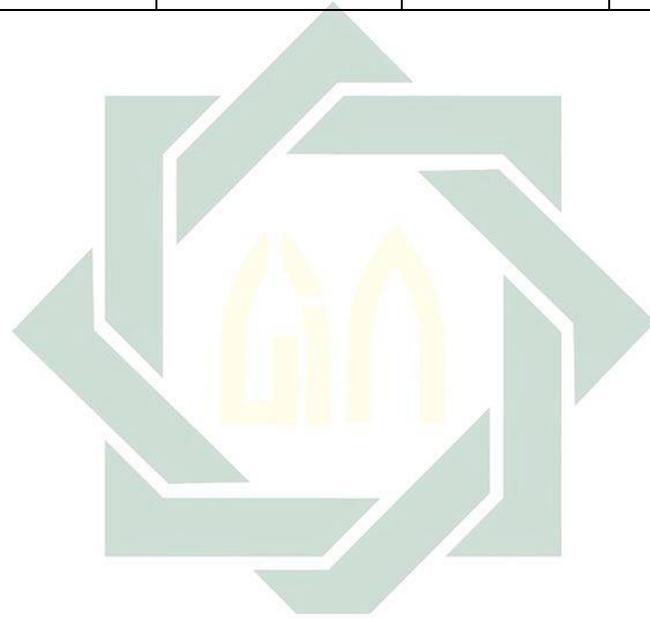
(Nuzulul Siswo Abdulaziz)

			daerah Kabupaten Kampar berdasarkan indeks kepuasan masyarakat.		Daerah Kabupaten Kampar			Indeks Kepuasan Masyarakat	Untuk hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tergolong baik.	
4	Deni Solihin	ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN VALUE FOR MONEY PADA POLITEKNIK TEDC BANDUNG (Periode 1 September 2017 s/d 31 Agustus 2018)	Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai value for money dan dipandang sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada Politeknik TEDC Bandung.	Politeknik TEDC Bandung	Bagian Keuangan Politeknik TEDC Bandung	1 September 2017 s/d 31 Agustus 2018	Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money Pada Politeknik Tedc Bandung	Rasio Ekonomis Rasio Efisiensi Rasio Efektivitas	Hasil menunjukkan bahwa kinerja Politeknik TEDC Bandung dari aspek ekonomi sebesar 87.69%, angka tersebut tergolong cukup ekonomis. Aspek efisiensi menunjukkan persentase 88.06%, tergolong cukup efisien. Sedangkan aspek efektivitas menunjukkan hasil 85.00%, angka tergolong cukup efektif.	2019
5	Arni Karina dan Dephy Noerainy	EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH	Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah	Provinsi DKI Jakarta	Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2008 – 2012	2008 – 2012	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Rasio Kemandiri 2. Rasio Efektifitas 3. Rasio Efisiensi	Rasio kemandirian rata – ratanya adalah 55,338% termasuk kategori partisipatif, rasio	2016

		PROVINSI DKI JAKARTA	Pemprov DKI Jakarta				Provinsi Dki Jakarta	4. Rasio Aktivitas 5. Rasio Pertumbuhan	efektifitas rata – ratanya 104,915% termasuk dalam kriteria sangat efektif, rasio efisiensi rata – ratanya 92,10% termasuk dalam kriteria kurang efisien, dan rasio pertumbuhan dari tahun anggaran 2008 – 2012 mengalami kenaikan yang beragam	
6	Mega Oktavia Ropa	ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN	Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Kabupaten Minahasa Selatan	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Minahasa Selatan	2011-2014	Kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan	1. Rasio Efektivitas 2. Rasio Efisiensi 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 4. Rasio Aktifitas 5. Rasio Pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan cukup baik, dengan melihat rasio efektifitas yang masuk pada kategori efektif, rasio efisiensi masuk pada kategori kurang	2016

									efisien, rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah masih tergolong rendah, untuk rasio aktifitas tergolong kurang baik, untuk rasio pertumbuhan tergolong baik, sedangkan pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan tergolong kurang baik.	
7	Heri Susanto	ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Nusa	Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat.	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Data keuangan APBD Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007	2003-2007	Kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kemandirian 2. Rasio ketergantungan 3. Rasio desentralisasi fiskal 4. Rasio efektivitas 5. Rasio efisiensi 	Hasil menunjukkan tingkat kemandirian sangat kurang, tingkat ketergantungan masuk kategori sangat tinggi, tingkat desentralisasi fiskal masuk kategori cukup, tingkat efektivitas masuk kategori sangat	2014

		TENGARA BARAT								efektif. Sedangkan tingkat efesiensi masuk kategori tidak efisien.	
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	OTONOMI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)			Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.
		3. Waktu		2015-2019
		4. Variabel		Kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
		5. Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas - Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 	
3	ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR	1. Obyek		Kota Surabaya
		2. Sampel		Hanya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.
		3. Waktu		2015-2019
		4. Variabel		Kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya berdasarkan aspek keuangan
		5. Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas 	

			- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	
4.	ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN VALUE FOR MONEY PADA POLITEKNIK TEDC BANDUNG (Periode 1 September 2017 s/d 31 Agustus 2018)	1. Obyek		Kota Surabaya
		2. Sampel		Hanya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.
		3. Waktu		2015-2019
		4. Variabel		Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya
		5. Metode	- Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
5.	EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	1. Obyek		Kota Surabaya
		2. Sampel		Menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.
		3. Waktu		2015-2019

		4. Variabel	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	
		5. Metode	- Rasio Efisiensi - Rasio Efektivitas - Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	
6.	ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN	1. Obyek		Kota Surabaya
		2. Sampel		Menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.
		3. Waktu		2015-2019
		4. Variabel	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	
		5. Metode	- Rasio efisiensi - Rasio efektivitas - Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	
7.	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA Mendukung Pelaksanaan	1. Obyek		Kota Surabaya
		2. Sampel		Menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD)

Tabel 4. 1
Target Anggaran APBD Kota Surabaya Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PENDAPATAN	6.642.257.716.374,00	6.720.301.543.490,00	7.904.894.969.358,00	8.079.142.194.268,00	8.733.224.623.734,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.782.647.234.297,00	3.944.467.129.125,00	4.709.645.546.043,00	4.758.967.236.960,00	5.234.687.226.266,00
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	2.679.368.000.000,00	2.802.516.278.889,00	3.265.955.423.267,00	3.615.432.902.416,00	4.008.794.324.904,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	449.613.176.717,00	342.925.912.793,00	392.397.980.801,00	364.330.957.049,00	396.051.109.746,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	135.637.837.123,00	131.805.808.333,00	137.981.858.739,00	141.308.453.768,00	156.728.284.536,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	518.028.220.457,00	667.219.129.110,00	913.310.283.236,00	637.894.923.727,00	673.113.507.080,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.834.807.600.077,00	2.770.834.414.365,00	3.145.227.658.315,00	3.091.812.357.308,00	3.219.666.956.468,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak	318.204.210.000,00	443.747.996.528,00	473.613.566.505,00	507.650.130.687,00	442.217.960.000,00
1.2.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	32.336.748.633,00	23.994.419.866,00	22.453.979.673,00	37.622.319.012,00	85.458.227.849,00
1.2.3	Dana alokasi umum	1.147.385.486.000,00	1.010.059.323.816,00	1.211.713.876.000,00	1.211.713.876.000,00	1.308.697.316.000,00
1.2.4	Dana alokasi khusus	12.955.800.000,00	317.628.474.350,00	466.697.504.000,00	440.719.310.000,00	477.827.337.000,00
1.2.5	Dana otonomi khusus	-	-	-	-	-
1.2.6	Dana penyesuaian	463.025.317.000,00	-	-	-	-
1.2.7	Pendapatan bagi hasil pajak (propinsi)	856.175.299.221,00	970.489.960.582,00	967.584.022.137,00	890.407.321.609,00	901.445.686.619,00
1.2.8	Pendapatan bagi hasil lainnya	1.359.339.223,00	1.359.339.223,00	-	-	-
1.2.9	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	3.365.400.000,00	3.554.900.000,00	3.164.710.000,00	3.699.400.000,00	4.020.429.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	24.802.882.000,00	5.000.000.000,00	50.021.765.000,00	228.362.600.000,00	278.870.441.000,00
1.3.1	Pendapatan hibah	-	-	-	179.612.600.000,00	193.234.560.000,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.802.882.000,00	5.000.000.000,00	50.021.765.000,00	48.750.000.000,00	85.635.881.000,00
2	BELANJA	7.928.337.395.393,00	8.115.231.350.395,00	8.963.930.686.060,00	9.268.450.333.673,00	9.933.509.442.785,00
2.1	Belanja Operasi	5.428.462.664.366,00	5.960.102.058.775,00	6.101.584.614.463,00	6.529.097.519.297,00	6.965.363.908.606,00
2.1.1	Belanja pegawai	2.579.203.525.763,00	2.711.905.402.999,00	2.561.530.634.574,00	2.635.973.536.954,00	2.713.569.439.655,00

2.1.2	Belanja barang dan jasa	2.417.183.344.025,00	2.956.213.760.468,00	3.360.370.631.852,00	3.666.769.874.931,00	4.088.673.664.945,00
2.1.3	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi	-	22.172.976.000,00	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	428.341.520.833,00	267.632.969.713,00	177.606.478.734,00	223.172.686.715,00	159.827.326.309,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	1.651.000.000,00	-	-	-	-
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	2.083.273.745,00	2.176.949.595,00	2.076.869.303,00	3.181.420.697,00	3.293.477.697,00
2.2	Belanja Modal	2.486.345.703.617,00	2.144.518.665.570,00	2.844.371.811.527,00	2.720.098.071.386,00	2.952.664.659.049,00
2.2.1	Belanja tanah	583.958.300.267,00	329.210.536.206,00	772.503.120.013,00	458.551.424.792,00	680.909.604.065,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	420.942.144.315,00	343.944.132.392,00	587.855.605.985,00	688.028.677.459,00	554.158.968.111,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	570.599.081.523,00	628.313.300.352,00	674.492.420.486,00	797.278.119.456,00	762.792.864.837,00
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	903.553.073.475,00	840.555.116.570,00	802.961.544.880,00	767.147.172.580,00	933.484.695.641,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	6.436.815.145,00	449.731.140,00	3.874.147.620,00	7.737.862.759,00	20.354.893.670,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	856.288.892,00	2.045.848.910,00	2.684.972.543,00	1.354.814.340,00	963.632.725,00
2.3	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	13.262.581.500,00
2.4	Transfer	3.529.027.410,00	610.626.050,00	7.974.260.070,00	9.254.742.990,00	2.218.293.630,00
2.4.1	Bagi hasil retribusi	3.529.027.410,00	610.626.050,00	7.974.260.070,00	9.254.742.990,00	2.218.293.630,00
C.	PEMBIAYAAN	1.286.079.679.019,00	1.394.929.806.904,82	1.059.035.716.702,00	1.189.308.139.405,00	1.200.317.972.688,92
1	Penerimaan Daerah	1.311.544.540.067,00	1.414.929.806.904,8	1.069.035.716.702,00	1.189.308.139.405,00	1.200.317.972.688,92
2	Pegeluaran Daerah	25.464.861.048,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
3	SILPA	-	-	-	-	-

Sumber: Surabaya.go.id

Syaeful, Bahri & Madzalim, “Pemetaan Topografi, Geofisika, dan Geologi Kota Surabaya”, *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya*, (2012), 25.

Zikri, Zarman. et al. “Analisis Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar”, *Jom Fekon*, No. 2, Vol. 1, Oktober, 2014.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.